KONSEP HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

THE CONCEPT OF LAW AS A MEANS OF SOCIAL ENGINEERING IN NATIONAL DEVELOPMENT

Herdy Mulyana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
herdymulyana85@gmail.com

Abstrak

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, semua hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif, penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam pembangunan nasional yaitu hukum berfungsi sebagai alat/sarana untuk merekayasa sosial. Karakteristik konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial adalah dengan pendekatan *beureucatic engineering* yaitu dengan mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan (*leadership*) yang diharapkan dapat mewujudkan konsep perubahan dan pemberdayaan masyarakat melalui hukum sebagai sarana pembaharuan. Dengan demikian fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan diharapkan sekaligus dapat menciptakan harmonisasi antara elemen dalam masyarakat ke dalam satu wadah yang disebut *beureuctic and sosial engineering* (BSE).

Kata kunci: Hukum, Pembangunan, Rekayasa Sosial.

Abstract

At the beginning of thinking about development, we often found ideas that identified development with development, development with modernization and industrialization, even development with westernization. All of these thoughts are based on the aspect of change, where development, development, modernization and industrialization, as a whole contain elements of change. However, all of these things have quite fundamental differences, because each has a different background, principles and essence as well as different principles of continuity, even though they are all forms that reflect change. The type of research used in this research is qualitative research. Qualitative research is research that has a descriptive nature, this research tends to use analysis. The research results show that the concept of law as a means of social engineering in national development is that law functions as a tool/means for social engineering. The characteristic of the concept of law as a means of social engineering is the bereucatic engineering approach, namely by prioritizing the concept of role models or leadership (leadership) which is expected to realize the concept of change and community empowerment through law as a means of renewal. In this way, it is hoped that the function of law as a means of reform can also create harmonization between elements in society into one forum called economic and social engineering (BSE).

Keywords: Law, Development, Social Engineering.

I. Pendahuluan

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.¹ Pengertian pembangunan di atas kiranya terdapat sedikitnya 3 (tiga) tema yaitu:

1. Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya.
2. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil.
3. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.² Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan,

¹ Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 2004.

² Deddy Supriady Bratakusumah & Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, semua hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.³

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya (Alexander, 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan antara lain dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme.

Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya

³ *Ibid.*

secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.⁴

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya dan sebagainya. Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional. Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya,

Siagian (1983) dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* mengemukakan, Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan

⁴ *Ibid.*

(*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat. Demikianlah kiranya pengertian pembangunan dari pandangan-pandangan para penulis.

Pembangunan hukum nasional secara implisit mencerminkan bahwa sampai saat ini di Indonesia masih terjadi proses perubahan sosial menuju ke arah modernisasi yang dikemas dalam proses legislasi yang teratur dan berkesinambungan dengan memasukkan aspek sosio-kultural yang mendukung arah perubahan dimaksud. Sejak pelita I (1 April 1969 - 31 Maret 1974), pelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979), pelita III (1 April 1979 - 31 Maret 1984), pelita IV (1 April 1984 - 31 Maret 1989), pelita V (1 April 1989 - 31 Maret 1994), pelita VI (1 April 1994 - 31 Maret 1999), filosofi yang dianut pembangunan hukum nasional yaitu konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Program pelita tahap VI ini menjadi sebuah kegagalan bagi pemerintah Orde Baru. Disusul dengan runtuhnya Orde Baru setelah adanya reformasi pada tahun 1998 oleh mahasiswa. Dengan demikian, program pelita VI dapat dikatakan sebagai program pembangunan nasional terakhir pada masa pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Soeharto. Sebelum terjadi kekacauan diberbagai bidang, baik bidang ekonomi, politik dan lainnya. Kondisi masyarakat pada masa itu tidak dapat dikontrol kembali oleh pemerintahan yang berkuasa. Masyarakat hidup dalam kekacauan yang tidak berujung, hingga menimbulkan kemarahan dari berbagai pihak. Aksi-aksi pemberontakan terjadi di mana-mana, menandakan bahwa era Orde Baru milik kepemimpinan Presiden Soeharto akan segera runtuh. Puncaknya ada pada aksi mahasiswa yang kemudian disusul dengan aksi pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada masa itu.

Setelah berakhir era orde baru, sekarang berubah menjadi era orde reformasi yang saat ini sudah masuk tahun ke- 25, maka telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari sistem yang otoritarian kepada sistem demokrasi dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonomi. Hal ini berdampak kepada sistem hukum yaitu sistem hukum yang dianut selama orde baru menitikberatkan kepada produk-produk yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa dari pada kepentingan rakyat dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah pusat daripada kepentingan pemerintah daerah. Sedangkan pada era reformasi ini terdapat fenomena yang berubah seperti di bawah ini:

1. Kecenderungan sistem otonomi menjadi lebih diperluas
2. Kecenderungan menganut multi partai dengan sistem koalisi dan oposisi partai

3. Kecenderungan pemisahan kekuasaan secara tegas (*separation* bukan lagi *differentiation*) antara eksekutif, legislative dan yudikatif sangat berpengaruh terhadap *law making process* dan *law enforcement proses*
4. Masuknya pengaruh-pengaruh LSM ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan proses legislasi
5. Adanya Tap MPR yang memerintahkan kepada Presiden untuk melaksanakan pemberantasan KKN dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang semakin menambah beban pemerintah yang tidak kecil di masa kini dan mendatang.

Melihat hal-hal di atas, maka perubahan paradigma pembangunan nasional saat ini selayaknya direspon oleh para akademisi dan praktisi hukum dengan cara mengamati fenomena-fenomena yang terjadi dalam percaturan politik dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengemukakan masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan hukum dalam pembangunan nasional?
2. Bagaimanakah konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam pembangunan nasional?

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mempunyai ranah yang sangat luas, hal ini karena penelitian bisa dilakukan pada semua bidang ilmu, seperti ilmu ekonomi, kesehatan, teknologi, hukum dan lain-lain. Penelitian juga bisa menggunakan metode yang berbeda-beda, maka dari itu penelitian dibagi menjadi beberapa macam. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif, penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada. Landasan teori juga berperan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai latar penelitian dan sebagai bahan sebuah pembahasan dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif memiliki objek penelitian yang cukup terbatas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis yang berkenaan dengan peranan hukum dalam pembangunan nasional. Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan partisipasi hukum dalam pembangunan nasional.

3. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah. Kemudian dikaitkan dengan pendapat-pendapat dan hasil penelitian para sarjana serta data berupa bahan dari kamus hukum.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.⁵ Data dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku buku literatur, dokumen dan arsip atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek atau materi penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode normatif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma-norma, teori dan doktrin hukum.⁶ Data yang diperoleh dianalisis dengan metode normatif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma-norma, teori dan doktrin hukum. Metode analisis kualitatif yaitu analisis terhadap data yang bersifat kualitatif.⁷ Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-

⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2013.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2007.

⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

bahan hukum. Data yang ada dikualifikasikan atau dikelompokkan sebagai suatu peristiwa hukum dan kemudian diolah untuk dibandingkan, dikaji, dianalisis dan diuraikan melalui penafsiran-penafsiran secara kualitatif sehingga hasilnya dapat diperoleh dalam pembahasan masalah.

III. Pembahasan

1. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional

Perjalanan era Reformasi sejak tahun 1998 sampai saat ini (tahun 2023) sudah berlangsung selama kurang lebih 25 tahun. Selama ini dapat dirasakan telah terjadi perubahan yang berhubungan dengan substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan aparatur hukum. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dari fenomena-fenomena sebagai berikut:

- a. Terbentuknya lembaga-lembaga negara yang baru setelah amandemen UUD 1945 seperti mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisia (KY), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta berubahnya kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tinggi negara sejajar dengan DPR, Presiden, BPK, MA, MK yang akan berdampak kepada kehidupan masyarakat terutama di bidang politik, sosial dan ekonomi terutama dalam sistem penegakan hukum di masa yang akan datang dan fenomena yang lainnya.
- b. Adanya Tap MPR yang memerintahkan Presiden untuk melaksanakan pemberantasan KKN dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang kemudian dijabarkan dengan undang-undangnya yang semakin menambah beban pemerintah yang tidak kecil di masa kini dan mendatang.
- c. Kecenderungan sistem otonomi daerah menjadi lebih diperluas sehingga menjadi semi federalisme.
- d. Kecenderungan sistem multipartai yang berdampak terhadap sistem kabinet presidensil yang selama dianut dalam UUD 1945 yang sekarang mengenal partai oposisi dan partai koalisi dengan pemerintah.
- e. Kecenderungan pemisahan kekuasaan secara tegas antar eksekutif, legislatif dan yudikatif yang akan berpengaruh kepada *Law making process* (LMP) dan *Law enforcement process* (LEP).
- f. Masuknya pengaruh-pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan proses legislasi.

Perubahan-perubahan seperti di atas memerlukan penataan yang bersifat komprehensif dan tidak parsial terutama dalam proses legislasi. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang berbentuk *omni bus law*. Pembangunan hukum nasional masa demokrasi ini harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, hak asasi manusia dan membuka akses publik kepada kinerja pemerintahan. Jika tidak demikian, maka akan mengakibatkan kondisi yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif, perampasan hak-hak rakyat di bidang politik, ekonomi dan sosial yang sangat mudah dapat ditemukan dan diketahui oleh masyarakat yang sudah semakin pintar mengenal Teknologi Informasi.

Akibat dari perubahan-perubahan sebagaimana dijelaskan di atas, maka peranan hukum dalam pembangunan nasional saat ini lebih mendasar penekanannya kepada pembangunan yang bertalian erat dengan sistem hukum. Sistem hukum yang dimaksud adalah substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan aparatur hukum. Subsistem hukum keempat merupakan subsistem yang bersifat strategis dalam menentukan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Secara yuridis kedudukan Negara Indonesia sebagai Negara hukum cukup kuat, karena secara konstitusional pernyataan atau deklarasi bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Daniel S. Lev penegasan yuridis konstitusional Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum sangatlah tepat, karena berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang Negara hukum dengan berbagai alasan. Misalnya kelompok etnis non Jawa termasuk etnis Cina menopang Negara hukum karena melihat manfaat Negara hukum yang lebih mendorong diciptakannya norma-norma yang lebih bersifat publik dari pada norma-norma birokratis yang lebih mengandalkan pada basis *patrimonial* dari pada *rasional*. Kelompok minoritas agama seperti Kristen dan Katolik mendukung ideologi negara hukum karena dalam Negara hukum mereka melihat adanya janji perlindungan secara normatif dan ekonomi. Demikian pula kelompok Islam memberi dukungan kuat terhadap konsep negara hukum terutama dari golongan modernis yang peranannya sangat marginal secara sosial dan politik. Walaupun dari segi jumlah merupakan mayoritas, namun dari segi *sosial* dan *politik* golongan Islam di Indonesia sering disubordinasi pada *artistokrasi* lama yang secara fisik nampak sebagai orang muslim namun sering memusuhi nilai-nilai Islam dan tuntutan-tuntutan politiknya. Bagi kelompok Islam konsep Negara hukum memberikan kekuatan protektif terhadap

pengaruh mereka yang terbatas untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan politik nasional.⁸

Secara operasional, konsep Negara hukum ini sudah diintrodusir dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari UUD, diantaranya dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, yaitu dalam Bab IV mengenai Arah Kebijakan Bidang Hukum, yang pada poin pertama menyebutkan: “Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum”. Peraturan perundang-undangan lain yang merupakan penjabaran operasional konsep negara hukum diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pembangunan hukum Indonesia yang sudah dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia telah menghasilkan sistem hukum sebagaimana yang ada sekarang. Sistem hukum yang dibangun oleh rezim Orde lama adalah sistem hukum yang kurang memperhatikan atau bahkan menabrak sendi-sendi Negara hukum. Dilihat dari perkembangan atau perubahannya Pada masa rezim Orde Lama berkuasa, salah satu pilar keberadaan Negara hukum yaitu *adanya badan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah terdistorsi*, sehingga secara yuridis formal keberadaan kekuasaan kehakiman yang bebas sudah tidak ada lagi. Konfigurasi politik dan birokrasi yang dianut penguasa Orde lama banyak yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Akibat konfigurasi politik dan birokrasi yang demikian menjadikan terjadi hubungan vertical antara Presiden dengan lembaga tertinggi dan tinggi Negara itu, dengan kedudukan Presiden berada di tempat teratas. Konfigurasi politik dan birokrasi sebagaimana diuraikan di atas pada hakekatnya mengandung “peradilan Terpimpin” artinya peradilan yang tidak bebas, disebabkan kehendak mewujudkan Demokrasi Terpimpin, sebagai inti dari isi Manipol selaku haluan Negara yang semula ditetapkan dengan penpres dan dikuatkan oleh TAP MPR No. I/MPRS/1960.⁹

⁸ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm.386.

⁹ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1989, hlm.94.

Wantjik Saleh secara ekstrim mengatakan bahwa telah diciptakan peradilan tidak bebas yang mengakibatkan goncangan salah satu “tiang agung” dari Undang-undang Dasar 1945 yang dapat meruntuhkan Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila.¹⁰ Sedangkan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pada masa Pemerintahan Kabinet Presidential Soekarno, kemerdekaan kekuasaan kehakiman teah sirna sama sekali.¹¹

Menurut Sarbini Soemawinata, pada awalnya Orde Baru memang didukung oleh hampir seluruh kekuatan demokrasi, kekuatan yang pada dasarnya didorong oleh cita-cita kerakyatan yang mendambakan pemerintahan yang bersih, adil, bermoral tinggi, dan demokratis. Akan tetapi 3 atau 4 tahun setelah berdirinya Orde baru mulai mendapatkan koreksi tajam/penentangan dari kekuatan oposisi (kekuatan yang tadinya ikut mendukung berdirinya Orde baru), karena Orde Baru mulai menunjukkan gejala-gejala yang menyimpang dari cita-cita awal berdirinya. Rezim Orde baru menunjukkan kelemahan-kelemahan dan keserakahan yang makin lama makin besar dan menguasai seluruh kekuasaan Negara. Orang-orang yang berkuasa mulai memusatkan perhatian dan pamrihnya kepada kekuasaan dan kekayaan. Maka timbullah korupsi, kolusi, *cronyism*, nepotisme yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat dan Negara, khususnya meliputi bagian kehidupan yang dikuasai oleh birokrasi dan usaha-usaha ekonomi dari orang-orang di sekitar pusat kekuasaan.

Kebobrokan birokrasi sebagaimana diuraikan diatas berjalan seiring dengan merosotnya nilai-nilai akhlak dan disiplin nasional.¹² I.S. Susanto sependapat dengan Sarbini Soemawinata, mengatakan bahwa birokrasi yang berkembang/dikembangkan selama rezim Orde Baru telah menyimpang dari paradigma/hakekat keberadaan birokrasi itu sendiri. Paradigma birokrasi seharusnya adalah pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi birokrasi pada zaman orde baru termasuk didalamnya birokrasi sistem Peradilan Pidana (SPP) tidak lagi berparadigma kesejahteraan masyarakat, akan tetapi berparadigma kekuasaan yang bercirikan minta dilayani masyarakat (seharusnya melayani), eksekutif, arogan, dan korup. Nonet dan Selznick mengkategorisasi hukum dalam tiga tipe yaitu tipe hukum represif, tipe hukum otonom dan tipe hukum responsive, maka sistem hukum yang

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Sumber Cahaya, 1976, hlm.20.

¹¹ Yusril Ihza Mahendra, “Adakah Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”, *Makalah*, pada Seminar Nasional: Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Indonesia, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1996, hlm.4.

¹² Sarbini Sumawinata, *Revolusi*, Jakarta: Yayasan Kerakyatan, 1998.

dibangun oleh rezim Orde lama dan Orde baru, khususnya menyangkut kekuasaan kehakiman, dapat dikategorikan ke dalam tipe hukum represif.¹³

Hukum represif adalah hukum yang mengabdikan kepada kekuasaan represif, yaitu kekuasaan yang kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat yang diperintahnya, disamping institusi-institusi hukum yang ada langsung terbuka bagi kekuasaan politik.¹⁴ Hukum responsif (*responsive law*) adalah hukum yang berfungsi sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (*law as facilitator of response to sosial needs and aspirations*).¹⁵ Tumbangnya rezim Orde baru pada tahun 1998, dijadikan tonggak kelahiran suatu orde yang sering disebut sebagai orde reformasi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada era reformasi ini, reformasi hukum nasional merupakan kebutuhan yang paling fundamental, karena dengan reformasi hukum ini dipercaya akan menghasilkan sistem hukum yang responsif dan menggerakkan gerbong reformasi di lain sektor kehidupan masyarakat.

Menurut Arief Ghosita, Reformasi hukum nasional harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan, meliputi pembangunan hukum yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a. Usaha-usaha yang terdiri atas kegiatan-kegiatan memperbaiki, mengurangi, menambah hukum yang berlaku atau menggantikannya dengan yang baru sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi di Indonesia;
- b. Memenuhi persyaratan tertentu yang menunjang pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan UUD 1945 sebagai pengamalan Pancasila;
- c. Pengembangan landasan filosofis, etis, dan yuridis tertentu;
- d. Pengembangan bahasa yang tepat dalam peraturan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dihayati oleh banyak orang sebagai subyek dan obyek hukum, sehingga mendukung penerapannya;

¹³ I.S. Susanto, "Lembaga dan Pranata Hukum", Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1998.

¹⁴ Peter, A.A.G dan Koesriani Siswosoebroto (Ed.), Hukum dan Perkembangan Sosial, Jakarta: Sinar Harapan, 1990.

¹⁵ Philippe Nonet & Philip Selznick, Law and Society in Transition; Toward Responsive Law, New York: Harper Colophon Books, 1978.

¹⁶ Arief Gosita, "Reformasi Hukum yang Berpihak Kepada Rakyat dan Keadilan (Beberapa catatan)", *Jurnal Keadilan*, Vol.1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2000, hlm.51.

- e. Pengadaan dan partisipasi alat penegak hukum yang memahami dan menghayati makna hukum sebagai sarana dan dasar pembangunan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan; dan
- f. Pemahaman dan penghayatan reformasi hukum sebagai suatu bentuk perwujudan pelayanan kesejahteraan manusia. Hukum harus dapat mendukung pelayanan terhadap sesama manusia yang mempunyai permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan.

Selain itu, Arief Ghosita menjelaskan bahwa dalam melakukan pembaharuan hukum nasional, perlu diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga menghasilkan suatu produk perundang-undangan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Adapun persyaratan yang sekaligus dapat dijadikan alat pengukur kualitas hukum atau suatu perundang-undangan adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. *Rasional positif*. Substansi suatu peraturan harus dapat dilaksanakan secara konseptual, berprogram, professional dan tidak emosional. Dengan demikian dapat dicegah penentuan sikap dan pengambilan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang;
- b. *Dapat dipertanggung jawabkan*. Substansi dari suatu peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal terhadap sesama manusia (manusia yang sama harkat dan martabat sebagai manusia) dan secara vertikal terhadap Tuhan (kebebasan beragama, beribadah);
- c. *Bermanfaat*. Peraturan perundang-undangan tersebut harus bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain (masing-masing dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab);
- d. *Mengembangkan rasa kebersamaan, kerukunan, kesatuan, dan persatuan*. Substansi suatu peraturan merupakan dasar hukum dan pedoman mewujudkan kebersamaan, kerukunan, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Penerapannya tidak boleh diskriminatif, destruktif, monopolitis, atau menguntungkan golongan orang tertentu saja (anti sara, mendukung kebebasan beragama, pendidikan dan pelayanan);
- e. *Mengembangkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan rakyat*. Suatu peraturan suatu bertujuan mewujudkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Terutama

¹⁷ *Ibid*, hlm.52-53.

- rakyat golongan lemah mental, fisik dan sosial (anak, perempuan, penyandang cacat, dan sebagainya);
- f. *Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur/dilayani dan bukan perspektif kepentingan yang mengatur/melayani.* Suatu peraturan terutama harus dapat menjadi dasar hukum dan pedoman melindungi kepentingan (hak dan kewajiban) yang menjadi obyek pengaturan dan pelayanan, dan bukan kepentingan para pengusaha atau para pelaksana tugas yang mengatur dan melayani;
 - g. *Sebagai pengamalan Pancasila.* Substansi suatu peraturan harus merupakan pewujudan terpadu pengamalan semua sila Pancasila;
 - h. *Berlandaskan Hukum secara integratif.* Substansi suatu peraturan harus dapat dipahami dan dihayati oleh para obyek dan subyek hukum, sehingga dapat diterapkan secara terpadu dan harmonis dengan peraturan yang lain. Akibatnya, perlu diusahakan adanya koreksi, penyesuaian, pembaharuan peraturan perundang-undangan sesuai situasi dan kondisi terakhir dan terbaik untuk masyarakat;
 - i. *Berlandaskan Etika.* Suatu peraturan harus merupakan perwujudan dari suatu etika profesi dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral menurut bidang profesi masing-masing;
 - j. *Mengembangkan hak asasi dan kewajiban asasi yang bersangkutan.* Suatu peraturan tidak hanya dapat menjadi dasar hukum memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi juga untuk mengusahakan pelaksanaan kewajiban asasi manusia sesuai dengan kemampuan, situasi, dan kondisi yang bersangkutan;
 - k. *Tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kekuasaan dan kekuatan demi kepentingan pribadi atau kelompok.* Suatu peraturan yang baik tidak dapat dimanfaatkan orang untuk menyalahgunakan kekuasaan, kekuatan yang diperoleh dari kedudukan dan kewenangan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok;
 - l. *Mengembangkan respon/keadilan yang memulihkan.* Suatu peraturan harus dapat menjadi dasar hukum para obyek dan subyek hukum, berpartisipasi dalam usaha-usaha memulihkan (*restoratif*) terhadap para korban yang menderita (kerugian) mental, fisik dan sosial dengan memberikan asistensi (pelayanan, pendampingan) ganti kerugian (restitusi, kompensasi);

- m. *Tidak Merupakan factor Viktimogen.* Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya suatu penimbunan (*viktimisasi*), sehingga yang bersangkutan menderita mental, fisik, dan sosial. Sebaiknya juga memuat sanksi bagi para penimbul korban
- n. Tidak merupakan factor kriminogen. Substansi suatu peraturan tidak boleh terjadi suatu kejahatan (kekerasan, penipuan, penyuapan, korupsi dan sebagainya);
- o. *Mendukung penerapan unsur-unsur manajemen: kooperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.* Dalam pembuatan dan penerapan peraturan diperlukan adanya pelaksanaan unsure-unsur manajemen, seperti kooperasi (antar instansi), koordinasi (antar instansi), integrasi (interdisipliner, intersektoral, inter departemental), sinkronisasi (kesinambungan usaha), simplifikasi (perumusan sederhana, mudah dimengerti oleh banyak orang untuk dilaksanakan). Sampai saat ini unsur ini masih diabaikan;
- p. *Berdasarkan citra yang tepat mengenai obyek dan subyek hukum, sebagai manusia yang sama harkat dan martabatnya.* Citra yang tepat mengenai manusia ini dapat menjadi landasan dalam mencegah perbuatan yang merugikan rakyat dan landasan pengembangan respons yang restoratif terhadap rakyat yang menderita mental, fisik, dan sosial penerapan hukum yang negatif; dan
- q. *Mengembangkan lima senses, yaitu sense of belonging (rasa memiliki), sense of responsibility (rasa tanggung jawab), sense of commitmen (memiliki komitmen), sense of sharing (rasa berbagi) dan sense of servingm (saling melayani).*

Untuk menghasilkan suatu produk perundang-undangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana di atas, tentulah tidak mudah. Hal hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan komitmen yang tinggi (*political will*) dari penguasa, khususnya lembaga legislasi (pembuat undang-undang) dan pemerintah dari puncak kekerasan sampai di tingkat paling bawah.
- b. Diperlukan pengetahuan dan keahlian yang memadai menyangkut *legal drafting*, sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum dan ilmu pendukung lainnya.
- c. Masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek hukum harus bersikap aktif memberikan masukan dan pressure dalam rangka reformasi hukum dan penegakannya.

2. Konsep Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Dalam Pembangunan Nasional

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi kegunaan/manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum mempunyai berbagai fungsi diantaranya adalah Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial (*sosial engineering*). Sebagai *sosial engineering*, maka hukum berfungsi sebagai alat/sarana untuk merekayasa sosial. Berkaitan dengan Peranan hukum dalam pembangunan hukum nasional, Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa karakteristik konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial adalah dengan pendekatan *beureucatic engineering* yaitu dengan mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan (*leadership*) yang diharapkan dapat mewujudkan konsep perubahan dan pemberdayaan masyarakat melalui hukum sebagai sarana pembaharuan. Dengan demikian fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan diharapkan sekaligus dapat menciptakan harmonisasi antara elemen dalam masyarakat ke dalam satu wadah yang disebut *beureuctic and sosial engineering* (BSE).

Romli Atmasasmita menjelaskan tentang karakteristik konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Hukum dipandang bukan sebagai perangkat yang harus dipatuhi oleh masyarakat saja melainkan juga harus dipandang sebagai sarana yang harus dapat membatasi perilaku aparat penegak hukum dan pejabat publik.
- b. Hukum bukan hanya diakui sebagai "*a tool of sosial engineering*" semata-mata akan tetapi juga harus diakui sebagai "*a tool of sosial and bereucratic engineering*".
- c. Kegunaan atau kemanfaatan hukum tidak lagi hanya dilihat dari kacamata kepentingan pemegang kekuasaan melainkan harus juga dikaji dari prospektif dan perspektif kepentingan *stakeholder*.
- d. Konsep hukum BSE menempatkan keseimbangan moralitas individual dan moralitas kolektif sebagai pedoman tingkah laku dalam penegakan hukum.
- e. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan sosial dan birokrasi dalam kondisi masyarakat yang bersifat *vulnerable* dan transisional tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya menggunakan pendekatan preventif dan represif semata-mata melainkan juga memerlukan pendekatan restoratif dan rehabilitatif.

- f. Agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal maka hukum tidak semata-mata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk merubah sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*).

IV. Penutup

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab di atas, maka kini saatnya penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan hukum dalam pembangunan nasional saat ini mengalami pergeseran yaitu setelah Reformasi tahun 1998 yang telah berdampak pada terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di mana pembangunan hukum nasional harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, hak asasi manusia dan membuka akses publik kepada kinerja pemerintahan. Karena jika tidak demikian, dikhawatirkan akan mengakibatkan kondisi yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif, perampasan hak-hak rakyat di bidang politik, ekonomi dan sosial yang sangat mudah dapat ditemukan dan diketahui oleh masyarakat yang sudah semakin pintar mengenal Teknologi Informasi. Peranan hukum dalam pembangunan nasional saat ini lebih mendasar penekanannya kepada pembangunan yang bertalian erat dengan sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan aparatur hukum. Secara yuridis kedudukan Negara Indonesia sebagai Negara hukum cukup kuat, karena secara konstitusional pernyataan atau deklarasi bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam pembangunan nasional yaitu hukum berfungsi sebagai alat/sarana untuk merekayasa sosial. Karakteristik konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial adalah dengan pendekatan *beureucatic engineering* yaitu dengan mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan (*leadership*) yang diharapkan dapat mewujudkan konsep perubahan dan pemberdayaan masyarakat melalui hukum sebagai sarana pembaharuan. Dengan demikian fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan diharapkan sekaligus dapat menciptakan harmonisasi antara elemen dalam masyarakat ke dalam satu wadah yang disebut *beureuctic and sosial engineering* (BSE).

Setelah memperhatikan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pembangunan nasional sudah seharusnya semua pihak yang terlibat untuk mendudukan hukum sebagai panglima.
2. Saat ini peranan hukum sebagai sarana pembaharuan sosial dapat dilaksanakan dengan lebih menggunakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman, *Tebaran Pikian tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
- Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Pusat Jogja Mandiri, 1994.
- Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: ELSAM, 1997.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Deddy Supriady Bratakusumah & Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Ginjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memandukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta: Pustaka CIDES INDO, 1994.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 2004.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Sumber Cahaya, 1976.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Bina Cipta, 1975.
- Mulyana W. Kusuma & Paul S. Baut, *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Yayasan Bantuan hukum Indonesia, 1986.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Peter, A.A.G dan Koesriani Siswosobroto (Ed.), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta: Sinar Harapan, 1990.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, New York: Harper Colophon Books, 1978.

- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Saleh. K. Wantjik, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Sumber Cahaya, 1976.
- Sarbini Sumawinata, *Revolusi*, Jakarta: Yayasan Kerakyatan, 1998.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1989.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Sondang P. Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1994.
- T. Dedy Tikson, *Administrasi Pembangunan*, Makassar: Gemilang Persada, 2005.

Jurnal

- Arief Gosita, "Reformasi Hukum yang Berpihak Kepada Rakyat dan Keadilan (Beberapa catatan)", *Jurnal Keadilan*, Vol.1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2000.
- Arief Gosita, "Reformasi Hukum, Antara Cita dan Fakta", *Jurnal keadilan*, Vol. 1 No. 2 Lembaga kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2000,
- Portes Alejandro, "On the Sociology of National Development: Theories and Issues", *American Journal of Sociology*, 1976.

Makalah

- Satjipto Rahardjo, "Konsep Keadilan dalam Perlindungan HAM", *Makalah*, pada Semiar Nasional, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 1997.
- Satjipto Rahardjo, *Sistem Pengadilan di Indonesia (Gagasan ke Arah Pembangunan*, Makalah Seminar Nasional: Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Indonesia, Fakultas hukum UNDIP, Semarang, 1996
- Yusril Ihza Mahendra, "Adakah Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", *Makalah*, pada Seminar Nasional: Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Indonesia, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1996.

Sumber Lain

I.S. Susanto, “Lembaga dan Pranata Hukum”, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1998.

Karya Ilmiah Para Pakar, “Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia”, Eresco, Bandung, 1995.